



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 2 2022; (page 91-115)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia

Sukron Romadhon

Institut Agama Islam Negeri Madura

Jl. Raya Panglegur KM 04 Pamekasan

e-mail: sukronromadhon@iainmadura.ac.id

Try Subakti

Institut Agama Islam Negeri Madura

Jl. Raya Panglegur KM 04 Pamekasan

e-mail: sukronromadhon@iainmadura.ac.id

Abstract

Toleransi sebagai sikap memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, tanpa melakukan penilaian bahwa pendapat yang disampaikan salah atau benar, sama atau berbeda. Penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum, bersatunya setiap elemen yang berbeda dalam berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma atau agama ke dalam sistem politik. Politik identitas hadir sebagai konstruksi masyarakat dalam menentukan posisi atas kepentingan suatu komunitas politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sajian data berupa deskriptif dengan ketajaman dan analisis data tentang toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Jenis penelitian dengan menggunakan studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif. Sumber data penelitian ini berupa data studi pustaka yang menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal, surat kabar. Hasil penelitian kepustakaan dan analisis menunjukkan bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

kepentingan kelompok tertentu, yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan; Tokoh masyarakat yang menjadi ikon tentang kriminalisasi politik nasional; Terciptanya politik yang dinamis tentu harus ada kontrol secara politik yang berimbang antara kubu koalisi *versus* oposisi; Sikap tegas Negara dalam menjaga stabilitas nasional dengan mencabut dan melarang ormas-ormas yang menimbulkan konflik social.

Keywords: *Toleransi, Politik Identitas, Perilaku Politik*

Pendahuluan

Diskursus tentang toleransi pada umumnya dikaitkan dengan persoalan budaya dan nilai-nilai yang beragam dan berkembang di masyarakat, adanya bentuk saling menerima tentang budaya, nilai, norma dan keyakinan yang beragam dalam masyarakat tentu akan terwujud. Sebagai bukti bahwa Indonesia sebagai masyarakat majemuk dan heterogen harus dan dituntut sadar akan pentingnya sikap toleran berbudaya, berkeyakinan atau beragama yang sejak dahulu sudah ada dan lakukan oleh para leluhur kita.

Toleransi politik merupakan penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum, dengan mempersatukan setiap elemen yang berbeda, tentu dalam berbagai hal seperti budaya, nilai, norma atau agama ke dalam sistem politik yang terangkum dalam diktum hukum dan perundang-undangan. Perbedaan perspektif dalam politik tentu tidak bisa menjadi alasan bagi system nilai, budaya atau agama yang dianut oleh masyarakat

manapun, tetapi politik dalam ranah publik justru diikat oleh kesamaan dalam hal sistem hukum dan undang-undang.¹

Sementara itu, politik identitas adalah sebuah alat [politik](#) suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama yang tentu memiliki tujuan politik tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut.² Disisi lain, istilah politik diartikan sebagai kompetisi yang berlangsung antar manusia, biasanya dalam kelompok, untuk membuat kebijakan sesuai keinginan mereka.³ Secara tidak langsung kebijakan akan membentuk nilai dan kepercayaan pada masyarakat. Walaupun terdapat unsur-unsur yang terjadi, baik pro maupun kontra dalam kebijakan politik, namun kita perlu menganalisa secara objektif.

Realitas pertentangan antar politik identitas di Indonesia dipengaruhi oleh iklim menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang cenderung membawa isu-isu keagamaan, walaupun sebetulnya harus dipisahkan dengan persoalan negara. Tentu suasana politik yang akan datang sudah mulai terasa dinamikanya. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia ketika ada kasus penistaan agama, secara otomatis kelompok minoritas terindikasi merasa diskriminasi oleh kelompok mayoritas.

Sebagai bangsa yang besar tentu beberapa isu mengenai politik identitas harus dilihat apa, siapa, mengapa dan bagaimana suatu kepentingan itu dapat terealisasi? Kepentingan suatu kelompok elit tertentu akan menggunakan politik identitas sebagai upaya mengangkat kembali isu primordialisme. Ide atau gagasan yang ingin menciptakan suasana fanatisme seseorang atau kelompok maka cenderung menciptakan perpecahan dan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.

Peran *stakeholder* sangat dibutuhkan, ketika pertentangan politik identitas menjadi momentum yang diperkeruh dengan berbagai

1

<https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/589c252920afdbc31190aff/membangun-toleransi-politik>, diakses tanggal 17 November 2022.

² Alfaqi, M. Z. (2016). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28.

³ Michael G. Roskin, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

pemberitaan di media massa yang saling menuding kebenaran dan kesalahan dari kedua belah pihak. Peningkatan jumlah pemberitaan, bahkan dalam hitungan menit menyebabkan tidak terkendalinya isu mengenai politik identitas dan memunculkan persoalan baru tentang penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya.

Sebagai bangsa yang besar kita dituntut untuk bisa merawat nilai-nilai dan sikap toleransi dalam budaya dan agama, sementara toleransi berkaitan politik identitas dianggap masih terus mencari formulasi sendiri yang disebabkan kompleksitas nilai dan budaya masyarakat, sepenuhnya mampu menerima atas perbedaan pilihan politik. Namun perlu kita sadari bahwa politik telah mampu mengikat setiap perbedaan budaya, ras, suku dan agama ke dalam satu sistem hukum atau undang-undang yang telah disepakati dan dijalankan bersama.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Dengan tidak menggunakan perhitungan, tetapi menekankan kepada sumber data ilmiah dan alamiah. Dengan sajian data berupa deskripsi melalui ketajaman analisis terhadap persoalan toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Jenis penelitian dengan menggunakan studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif, terutama tulisan-tulisan tentang toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data studi pustaka yang menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis data (*content analysis*) yang mengkaji secara sistematis catatan atau dokumen sebagai sumber data. Dengan teknik deskriptif kualitatif, penulis dapat menggambarkan hingga menguraikan data yang bersifat kualitatif.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini meliputi; pencatatan, menelaah dari berbagai sumber; mengumpulkan,

memilah dan mengklasifikasikan data sesuai konteks yang dikaji kemudian dianalisis untuk mencari makna dan hubungan antar tema untuk dianalisis. Selanjutnya, untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik Trianggulasi, yaitu sumber data yang sudah ada dibandingkan keakuratannya dengan metode yang dipilih, lalu data dibandingkan kembali dengan hasil penelitian lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Tentang Toleransi

Munculnya istilah ini pertama kali lahir dan dikenal di negara-negara Eropa, Toleransi dalam bahasa Yunani disebut '*sophrosyne*' yang artinya moderasi (*moderation*) atau mengambil jalan tengah. Sementara istilah toleransi berasal dari bahasa latin '*tolerantia*' yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Secara etimologis istilah "*tolerantia*" dikenal sangat baik di daratan Eropa terutama pada masa industrialisasi di Perancis.⁴

Dalam bahasa Arab istilah ini merujuk kepada kata "*tasamuh*" yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda.

Toleransi diartikan bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian—pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan—yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran artinya batasan atau tolak ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.⁵ Sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa perlu kiranya untuk memperkuat wawasan kebangsaan kita dengan memahami toleransi sebagai konsep.

Pertama, Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda

⁴ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif, 2005), 212.

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1538.

secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama.⁶ Bangsa Indonesia dianggap sebagai negara bangsa yang memiliki sikap toleransi sehingga mampu bertahan menjadi bangsa yang kuat. Indonesia merupakan *role model* toleransi dalam bernegara, terbukti ketika Indonesia mampu menjadi tuan rumah *United Nations Alliance of Civilizations* (UNAOC) tahun 2014 di Nusa Dua Bali. Sebagai bentuk prestasi dan apresiasi dari negara-negara internasional bahwa Indonesia dapat menjadi *role model* bagaimana sebuah negara yang harmonis antar keberagaman suku, agama, ras dan budaya.⁷

Sebagai bentuk apresiasi sikap toleransi tentu mendapat respon positif dari beberapa tokoh dunia. Dr. Zakir Naik pernah menyampaikan rasa kagum dan bangga terhadap Indonesia, ia menganggap bahwa Indonesia merupakan Negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Sebagai Negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun tidak menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Islam. “Ini merupakan keistimewaan dari Indonesia sebagai Negara multikultural, menerapkan setiap agama sama di hadapan Negara dan agama tidak bisa diperbolehkan untuk menjadi sumber diskriminasi”⁸.

Kedua, Toleransi dapat memperkuat nilai-nilai yang hampir punah atau hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terbukti dengan banyaknya organisasi masyarakat yang menyuarakan sikap intoleran, isi membuat gaduh bangsa yang pada awalnya tentram di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah perlu memetakan

⁶ Fikri Fauzi Ma'mur, 2018, *Makna Toleransi dalam Bingkai Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama : Studi Deskriptif dalam Perspektif Pendidikan Politik di Jawa Barat* Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu, diakses tanggal 17 November 2022.

⁷ Di kutip dari Iqbal Fadillah, *Indonesia Negara Paling Tinggi menjunjung Tinggi Toleransi*, <https://www.neraca.co.id/article/86519/indonesia-negara-paling-tinggi-menjunjung-toleransi>, diakses tanggal 17 November 2022.

⁸ Iqbal, *Indonesia Negara Paling Tinggi menjunjung Tinggi Toleransi*.

mana Ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih bernuansa NKRI.⁹

Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menilai, pemerintah memang sangat perlu mengevaluasi keberadaan Ormas intoleran. Diakui ternyata bukan hanya Ormas saja yang perlu dibatasi gerakannya, namun pada tataran kajian tafsir agama yang berada dalam kajian-kajian lembaga pemerintah dan lembaga intelektual.¹⁰

Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah ketika membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. Sebagai organisasi kemasyarakatan, HTI dianggap menyimpang dan tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu "tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945". HTI disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya.¹¹

Walaupun bermacam penolakan dilakukan oleh para pengikut HTI, mereka ikut menyurakan aspirasinya hingga turun jalan, sampai melakukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pengacara HTI, Yusril Ihza Mahendra, bahwa doktrin khilafah tidak bertentangan dengan pancasila, ideology yang disampaikan bukan paham yang dilarang dalam UU Ormas, yaitu ateisme, komunisme dan marxisme.¹² Selanjutnya, HTI dianggap berpotensi menimbulkan konflik social yang dapat mengancam stabilitas nasional. Keputusan pemerintah mencabut status badan hukum HTI seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

⁹ Al Chaidar Abdurrahman, <https://www.beritasatu.com/nasional/711935/pemerintah-diminta-petakan-ormas-intoleran>, diakses tanggal 17 November 2022.

¹⁰ Islah Bahrawi, <https://www.beritasatu.com/nasional/711935/pemerintah-diminta-petakan-ormas-intoleran>, diakses tanggal 17 November 2022.

¹¹ Ronny Erry Saputro, *HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>, diakses tanggal 17 November 2022.

¹² Yusril Ihza Mahendra, *HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>, diakses tanggal 17 November 2022.

Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan pada UU Ormas.

Berikut nama-nama organisasi kemasyarakatan yang dianggap melakukan intoleran di Indonesia:

Organisasi Kemasyarakatan	Tahun Berdiri	Tahun dibubarkan	Tokoh Utama
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	1980	2017	Abd. Rahman al-Baghdadi
<i>Front Pembela Islam (FPI)</i>	1998	2019	Habib Rizieq Shihab
Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)	2008	2010	Abu Bakar Baasir
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	2000	2008	Abu Bakar Baasir
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)	2006	2008	Ahmad Musaddeq
Annas (Aliansi Nasional Anti Syiah)	2014	2014	K.H. Athian Ali Moh. Dai, Lc., MA

Masyarakat Indonesia dianggap mampu menjalankan nilai-nilai toleransi sekaligus nilai-nilai sistem demokrasi. Sekaligus diharapkan bisa memainkan peran kunci menyebarkan toleransi untuk meredam ekstrimisme dan terorisme yang semakin menguat di dunia. Indonesia juga diminta berperan lebih aktif dalam membagikan pengalamannya mengembangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai demokrasi.

Dengan demikian toleransi dalam konteks ini berarti kesadaran untuk hidup berdampingan dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebab hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat utama bagi setiap individu yang ingin kehidupan damai dan tenteram, maka dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama.

Makna Identitas Politik

Mengawali kajian tentang identitas politik, terlebih dahulu kita akan mendeskripsikan tentang perbedaan antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* dapat diartikan sebagai konstruksi yang menentukan posisi atas kepentingan suatu komunitas politik. Sedangkan *political of identity* diartikan sebagai mekanisme politik pengorganisasian identitas—baik identitas politik maupun identitas social—yang menjadi sumber dan sarana politik.¹³

Selama ini kajian mengenai politik identitas terdapat dua kategori identitas yang seringkali menjadi bahan kajian yaitu identitas sosial dan identitas agama. *Pertama*, Identitas social, meliputi identitas keagamaan, kelas, ras, etnis, gender dan seksualitas, dimana identitas sosial menentukan posisi individu di dalam relasi atau interaksi sosialnya. *Kedua*, identitas politik, meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, dimana identitas politik dapat menentukan posisi individu dalam sebuah komunitas melalui suatu rasa kepemilikan—*sense of belonging*—dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain dalam suatu perbedaan—*sense of Otherness*.¹⁴

Selanjutnya fenomena politik identitas seringkali menjadi alat politik kekuasaan. Kemala Chandakirana menyampaikan tentang politik identitas sering digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi—orang asli / pribumi—yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi—orang pendatang—yang harus melepaskan kekuasaan.¹⁵ Sehingga politik identitas hanya media yang digunakan penguasa untuk melakukan manipulasi dan sarana memperkuat kekuasaan dalam pemenuhan kepentingan politiknya. Hal inilah yang cenderung dilakukan oleh pemimpin yang berkuasa. Politik identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama

¹³ Haboddin, M.. Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, 109-126*, dikutip dari Yeni Sri Lestari., Politik identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama, *Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018, 23*.

¹⁴ Harahap, FR., Politik Identitas Berbasis Agama. *Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas*. Yogyakarta. Dikutip dari Yeni Sri Lestari (2018)., Politik identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama, *Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018, 23*.

¹⁵ Harahap, FR. (2014). *Politik Identitas Berbasis Agama*.

berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas.

Tidak terkecuali di Indonesia, pemahaman system politik modern mengenai demokrasi liberal yang mengagungkan Pancasila diatas segalanya menjadikan lembaga-lembaga social kemasyarakatan yang mengatasnamakan agama sebagai substansi keberadaanya dianggap sebagai ancaman bagi keragaman yang ada di Indonesia terutama terhadap agama minoritas.

Perilaku Politik di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja ucapan akan tetapi gerak tubuh atau badan. Sedangkan politik adalah segala urusan dan tindakan kebijakan atau siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan Negara dan Negara lain.¹⁶Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 menegaskan bahwa hak politik yang diaktualisasikan dalam bentuk partisipasi politik dan perilaku politik yang jamin oleh Negara.¹⁷ Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintahan, antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Dalam konteks ini, terlihat adanya dinamika antara pihak yang memerintah, saling mempengaruhi antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan; adanya saling mempengaruhi antar kelompok, ada yang menentang namun hasilnya kompromi; yang satu menjanjikan dan yang lain kecewa karena ada janji yang tidak ditepati. Sebenarnya situasi politik dianggap memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi respon emosional berupa dukungan atau sikap apatis terhadap pemerintah.

Menurut Varma, bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena dinggap tidak memberi proses politik yang baik. Namun, sebaiknya lebih mempelajari perilaku perorangan (*behavior*)

¹⁶ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet.1, 671 dan 694.

¹⁷ Ihsan. H, *Perilaku Politik*, 44

karena dianggap sebagai realitas yang benar-benar dapat diamati. Baik perilaku perorangan atau perilaku yang melibatkan banyak orang, seperti organisasi masyarakat, kelompok masyarakat atau kelompok kepentingan politik. Begitu juga dengan Gaventa dan Vanderma yang mengatakan bahwa perilaku politik sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi dan mendudukkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan. Perilaku politik diartikan suatu kegiatan atau tindakan perorangan maupun kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan politik.¹⁸

Secara konseptual perilaku politik bangsa Indonesia ketika dikaitkan dengan sikap toleransi dan politik identitas. *Pertama*, Teori Struktural Fungsional. Teori yang dikemukakan Emile Durkhaem ini pada dasarnya mengatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh fakta social.¹⁹ Dalam hubungannya dengan perilaku politik, pandangan ini memberikan pemahaman bahwa perilaku politik kekuasaan yang dilakukan pemerintah merupakan perilaku social yang bersifat sistemik dan mengikat berupa aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan hubungan politik kekuasaan secara vertikal yakni antara rakyat dengan negara.

Dalam pandangan struktural fungsional partisipasi masyarakat dalam pandangan politik tidak didasarkan atas kesadaran politik sebagai upaya swadaya politik, namun lebih pada dominasi mobilisasi massa secara kolektif. Dari anggapan dasar tersebut kita dapat menjelaskan dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dilarang atau dihentikan kegiatan social kemasyarakatannya. Secara implisit keberadaan ormas-ormas di Indonesia merupakan organisasi yang memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, dengan menggunakan kekuatan tokoh masyarakat atau agama yang menjadi patron dan pengikut setia atau klien merupakan kekuatan dalam melakukan mobilisasi massa dalam konteks politik nasional, sehingga eksistensi mereka dapat dikatakan sebagai bingkai keterlibatan dalam menjalankan kekuasaan politik kebangsaan.

Kedua, Teori Tindakan Social. Teori yang dikemukakan Max Weber ini melihat bahwa perilaku politik sebagai tindakan social yang mana actor politik terlibat langsung dalam pengambilan

¹⁸ Ihsan. H, *Perilaku Politik*, 11.

¹⁹ Ihsan. H, *Perilaku Politik*, 50.

keputusan.²⁰Tindakan yang makna jenis perilaku manusia, yang diorientasikan pada orang lain. Setiap tindakan memiliki makna subjektif, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terbuka maupun tertutup. Tindakan social dianggap perilaku yang direncanakan dan memiliki target tertentu. Perilaku warga Negara yang ikut serta dalam pemilu merupakan bentuk sikap warga Negara terhadap pemerintah. Perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak jelas sebagai bagian dari budaya politik. Bentuknya berupa ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan sesuatu yang bersifat mitologis dapat dikatakan sebagai akibat atas budaya politik.²¹

Namun, secara empiris kajian tentang perilaku politik merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang dikembangkan oleh kaum *behavioralis* dengan melihat dan menekankan pada aspek individual sebagai insan politik dari pada melihat sistem-sistem atau lembaga politik. secara historis, perilaku politik merupakan gerakan protes kaum *behavioralis tradisional* dalam politik di Amerika, yang kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung melakukan kegiatan pada hal tertentu saja.²²

Dalam hal toleransi dan politik identitas di Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh actor politik saat ini dianggap memiliki makna politik yang dikemas dengan lembaga social keagamaan__HTI, FPI, JAT, MMI, Gafatar dan Annas__maupun lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menarik minat para pengikutnya. Dengan beberapa klasifikasi tindakan social dengan empat tipe: *Instrumental rationaly*, tindakan yang ditentukan harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia; *Value rational*, tindakan yang didasari oleh nilai-nilai etika, estetika dan agama untuk mempengaruhi kehidupan manusia; *Affectual*, tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan actor yang melakukan; *Tradisional*, tindakan yang didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan sejak nenek moyangnya.²³

²⁰ Ihsan. H, *Perilaku Politik*, 50.

²¹ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: SIC, 2008, 51.

²² Ihsan Hamid, *Perilaku Politik, Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*, Mataram, Sanabil, 2020, 8.

²³ Ihsan. H, *Perilaku Politik*, 52.

Kesimpulan

Keberadaan politik identitas bukanlah faktor utama atas kehancuran integritas nasional di Indonesia, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia. Keberagaman dalam berbagai macam sektor, mendorong kita untuk mengepankan nilai-nilai kebangsaan. Bangsa Indonesia dapat menjadi *rool model* dalam menjalankan system pemerintahan yang memiliki latar belakang beragam dan dinamis. Sehingga gagasan tentang toleransi dan politik identitas menjadi langkah solutif dalam menyelesaikan dari berbagai macam konflik kelompok kepentingan.

Indikator yang muncul dalam dalam politik identitas. *Pertama*, bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan kepentingan kelompok tertentu, dengan mekanisme pengorganisasian identitas, baik identitas politik, social, budaya dan agama yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan. Sarana untuk mencapai kekuasaan dengan berbagai pola propaganda demi kemaslahatan suatu *nation-state*.

Kedua, keterlibatan tokoh politik, social budaya dan agama dalam kontestasi politik nasional, semakin membuktikan tentang dinamika politik nasional yang semakin maju dan terbuka dalam berbagai macam sector. Hal ini terbukti dengan munculnya para tokoh-tokoh nasional yang mengalami kriminalisasi dalam system hukum di Indonesia. Isu yang paling menarik tentang kriminalisasi ulama—dalam konteks social keagamaan—ketika ada gerakan politik yang akhir-akhir ini menjadi wacana politik nasional.

Ketiga, Diskriminasi politik menjadi indikator utama munculnya poros-poros politik identitas baru. Terciptanya politik yang dinamis tentu harus ada kontrol secara politik yang berimbang antara kubu koalisi *versus* oposisi. Pihak koalisi harus mampu menciptakan situasi politik nasional yang kondusif dengan mengedepankan kepentingan bersama, disisi lain pihak oposisi dituntut untuk menjadi control terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Keempat, munculnya organisasi social keagamaan yang akhir-akhirnya dicabut perizinannya karena dianggap melakukan gerakan melawan Negara dan menyimpang dari nilai-nilai dasar Negara yakni Pancasila. Langkah pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan dianggap bagian tugas Negara dalam menjadi stabilitas nasional, baik dibidang politik, social, budaya walaupun mengatasnamakan agama. *Wallahu'lam*.

Daftar Pustaka

- Alfaqi, M. Z., [Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas](#). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2016.
- Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektif, 2005
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: SIC, 2008.
- Fikri Fauzi Ma'mur, *Makna Toleransi dalam Bingkai Politik Kebangsaan Nabdlatul Ulama : Studi Deskriptif dalam Perspektif Pendidikan Politik di Jawa Barat* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu., 2018.
- Haboddin, M., Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012*.
- Harahap, FR. Politik Identitas Berbasis Agama. *Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas*. Yogyakarta, 2014.
- Yeni Sri Lestari, Politik identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama, *Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018*.
- Ihsan Hamid, *Perilaku Politik, Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*, Mataram, Sanabil, 2020.
- Iqbal Fadillah, *Indonesia Negara Paling Tinggi menjunjung Tinggi Toleransi*, <https://www.neraca.co.id/article/86519/indonesia-negara-paling-tinggi-menjunjung-toleransi>, 2022.
- Islah Bahrawi, <https://www.beritasatu.com/nasional/711935/pemerintah-diminta-petakan-ormas-intoleran>, 2022.
- Michael G. Roskin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ronny Erry Saputro, *HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>, 2022.

Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Yusril Ihza Mahendra, *HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>, 2022.